

# ISU-ISU ADMINISTRASI PUBLIK



**OLEH :**  
**Dra. Sri Yuliani , M.Si**

Disusun untuk pembekalan mata kuliah Seminar Isu-Isu Administrasi Publik Semester Agustus-Januari 2016

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2015**

Untuk menjelaskan isu-isu apa saja yang bisa menjadi topik penulisan artikel atau tema penelitian mahasiswa program studi administrasi negara terlebih dahulu perlu diketahui apa tujuan pengajaran administrasi publik . Gerald Caiden (dalam Warella, 1991) menyebutkan paling tidak ada 8 (delapan) tujuan pengajaran administrasi publik :

1. Menekankan perlunya kemampuan menulis secara efektif yaitu *clearly, precisely, dan concisely*.
2. Untuk mengembangkan kecakapan intelektual, kecakapan penelitian, maupun kemampuan praktis.
3. Untuk memperkenalkan mahasiswa dengan literatur dari setiap mata kuliah serta mengajarkan cara-cara untuk menemukan tulisan-tulisan baru, baik buku maupun jurnal profesi apabila mereka telah menyelesaikan studinya.
4. Untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya administrasi publik, cara-cara kerjanya, tradisinya, praktek-prakteknya, nilai-nilai yang dikandungnya serta bagaimana kecenderungannya.
5. Untuk mengkaji hubungan antara disiplin administrasi publik dengan disiplin-disiplin lainnya yang terkait, melihat keterkaitnya, membandingkan dan mengkontraskan perbedaan-perbedaan pendekatan.
6. Menekankan bagi mahasiswa pentingnya pandangan realisme, dasar-dasar empiris pragmatis dari subject matter ini serta kondisi dinamis administrasi publik.
7. Untuk mendidik warga negara yang memiliki intelegensia dan bertanggung jawab , meningkatkan partisipasi masyarakat dalam masalah-masalah publik, untuk memahami secara lebih baik budaya nasional serta nilai-nilai sosial yang dominan dan untuk mengembangkan pemimpin-pemimpin publik masa depan.
8. Mempersiapkan calon-calon untuk pekerja-pekerja pemerintah yang akan mengembangkan karier sebagai *public official*.

Tujuan program studi administrasi negara ini kemudian dijabarkan dalam kurikulum , terutama kurikulum inti atau mata kuliah keahlian. Di Program Studi Administrasi Negara FISIP UNS ada tiga konsentrasi studi yaitu Kebijakan Publik, Manajemen Publik dan Administrasi Pembangunan.

Manajemen Publik menjadi fokus studi karena administrasi publik mempelajari bagaimana birokrasi publik menjalankan administrasi dan manajemen urusan publik. Karena birokrasi publik adalah suatu organisasi, maka studi organisasi dan manajemen, serta aspek-aspek yang berhubungan seperti personalia, penganggaran, hubungan kemanusiaan dalam organisasi, pengelolaan aset negara, sistem informasi dan sebagainya sangat sentral dalam studi administrasi publik (Darwin, 1987).

Manajemen publik memfokuskan pada administrasi publik sebagai sebuah profesi dan memfokuskan pada manajer publik sebagai praktisi profesi tersebut. Manajemen publik lebih mencurahkan perhatian pada operasi-operasi atau pelaksanaan-pelaksanaan internal organisasi-organisasi pemerintah atau organisasi non-profit dalam sektor publik lainnya. Secara spesifik, manajemen publik memfokuskan pada bagaimana organisasi publik mengimplementasikan kebijakan publik. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan merupakan perangkat utama yang digunakan manajer publik dalam rangka menyelenggarakan pelayanan-pelayanan pemerintah (Ott, Hyde, dan Shafritz dalam Sudarmo 2002)

Dapat disimpulkan bahwa manajemen publik mempelajari tentang aspek manajemen dalam administrasi negara, yakni keunikan atau kekhususan dari manajemen sektor publik, serta mempelajari fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan manajer sektor publik dalam mengendalikan dan mengatur agar lembaga atau organisasi publik memberikan pelayanan publik yang adil dan berkualitas, dan bagaimana meningkatkan kinerja birokrasi publik sehingga bisa bekerja secara efisien, efektif dan produktif.

Studi kebijakan publik menjadi fokus pengajaran dalam ilmu administrasi negara karena administrasi negara berkenaan dengan bagaimana keputusan atau kebijakan publik diimplementasikan atau bagaimana birokrasi publik menjalankan fungsi sebagai implementor kebijakan publik.

Studi kebijakan publik berorientasi pada pemecahan masalah riil yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian studi kebijakan publik secara umum merupakan ilmu terapan dan berperan sebagai alat atau ilmu yang berusaha untuk memecahkan masalah. Pada konteks ini kebijakan publik memiliki beragam perspektif, pendekatan, maupun paradigma sesuai dengan focus dan locus dari obyek penelitian atau kajian.

Studi kebijakan publik dibedakan menjadi studi formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan dan analisis kebijakan. Studi formulasi mempelajari bagaimana proses perumusan suatu kebijakan, model-model perumusan dan faktor atau kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap proses perumusan atau pembuatan kebijakan. Studi implementasi berusaha mengungkapkan proses implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan. Studi evaluasi merupakan penilaian terhadap keberhasilan kebijakan/program dalam mencapai tujuan atau hasil. Ada dua jenis evaluasi yaitu evaluasi proses (implementasi) dan evaluasi hasil/dampak kebijakan. Evaluasi proses pada dasarnya sama dengan studi implementasi yaitu menilai pelaksanaan kebijakan dan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dan keberhasilan program. Sedang evaluasi dampak mengkaji instrumen atau komponen-komponen yang memiliki kontribusi terhadap munculnya berbagai dampak kebijakan. Studi analisis kebijakan merupakan aktivitas penelitian kebijakan (*policy research*) yang bertujuan memberi rekomendasi yang bermanfaat bagi *policy maker*. Studi ini mempertanyakan kebijakan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar problem publik tertentu dapat terpecahkan melalui suatu kebijakan atau program publik (Irfan Islamy, 1994 dan Agus Dwiyanto, 1995).

Administrasi pembangunan menjadi konsentrasi studi dalam administrasi negara karena problem pembangunan merupakan isu yang sangat kontekstual untuk administrasi negara sedang berkembang atau sedang membangun. Pembangunan merupakan proses perubahan masyarakat menuju kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang lebih baik. Ada yang menyamakan pembangunan dengan modernisasi atau perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat maju yang ditandai dengan penguasaan teknologi, ilmu pengetahuan, dan keahlian sebagaimana negara industri maju.

Administrasi pembangunan menjadi kajian penting dalam studi administrasi publik karena aktor penggerak utama pembangunan adalah birokrasi atau organisasi publik. Administrasi pembangunan adalah administrasi mengenai kebijakan, program dan proyek untuk mendukung tujuan-tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan mempelajari dua lingkup permasalahan pokok : 1) pembangunan administrasi negara yang mencakup upaya peningkatan kapasitas (organisasi/kelembagaan) administrasi negara dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi umum pemerintahan dan pembangunan;

dan 2) administrasi atau manajemen pembangunan yang meliputi pelaksanaan keseluruhan fungsi manajemen pemerintahan dalam menyelenggarakan pembangunan (Bintoro Tjokroamidjojo, 1984).

Berdasarkan pada ketiga konsentrasi studi administrasi negara diatas selanjutnya dapat diidentifikasi topik-topik penelitian yang dapat dikembangkan dalam disiplin administrasi negara serta kompetensi-kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh mahasiswa sebagai bekal untuk bersaing di dunia kerja.

No	Konsentrasi Studi	Topik-topik penelitian
1.	Manajemen Publik	<p>1. <b>Fungsi-fungsi umum manajemen publik</b> yang mencakup : perencanaan, pengorganisasian, pengadaan/penempatan staf , pengarahan, pengkoordinasian, penganggaran,dll.</p> <p>2. <b>Sumber daya manusia dan kepegawaian</b> yang meliputi : proses, seleksi, pendidikan dan latihan/pengembangan sumber daya manusia, sistem imbalan/penggajian, sistem pemeliharaan, hubungan kerja, prestasi kerja, efektivitas kerja, disiplin kerja, produktivitas, dsb.</p> <p>3. <b>Perilaku administrasi/interaksi manusia dalam organisasi</b> (publik) yang mencakup : motivasi, kepemimpinan, manajemen konflik, komunikasi administrasi, dinamika kelompok, pengembangan organisasi, manajemen stress, manajemen perubahan, dsb.</p> <p>4. <b>Analisis organisasi, metode perkantoran dan sistem informasi</b> meliputi : penyederhanaan kerja, tata ruang, prosedur kerja/proses kerja, tata kearsipan, dokumentasi , mekanisasi, E-government/E-governance, dsb.</p> <p>5. <b>Reformasi organisasi dan manajemen publik</b> mencakup: penerapan prinsip Good Governance , penerapan pelayanan publik satu atap, pelayanan publik melalui media elektronik, pembenahan kelembagaan, sistem, dan perilaku/budaya birokrasi; dsb</p> <p>6. <b>Penilaian kinerja birokrasi</b> : kualitas pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas pelayanan publik, responsivitas birokrasi, dsb</p>
2.	Kebijakan Publik	<p>1. <b>Formulasi kebijakan</b> yang mencakup : proses formulasi kebijakan dan peran birokrasi atau institusi publik dalam proses tersebut, analisis model perumusan kebijakan, analisis peran aktor-aktor/stakeholder dalam perumusan suatu</p>

		<p>kebijakan, dsb.</p> <p>2. <b>Implementasi kebijakan</b> mencakup : studi tentang proses implementasi suatu kebijakan/program dan analisis faktor dan aktor penentu keberhasilan maupun penyebab kegagalan implementasi suatu program.</p> <p>3. <b>Evaluasi kebijakan</b> mencakup : studi tentang efektivitas atau kinerja kebijakan dalam mencapai tujuan/hasil dan dampak program, serta analisis faktor dan aktor yang berkontribusi terhadap efektivitas/dampak program.</p> <p>4. <b>Analisis kebijakan</b> mencakup : studi terhadap problem publik tertentu yang perlu atau urgen untuk dicari jalan pemecahannya dengan cara melakukan penelitian kebijakan yang meliputi tahap identifikasi faktor-faktor penyebab problem, pengembangan model pemecahannya, penyusunan alternatif-alternatif pemecahan, analisis kelayakan, penentuan alternatif model intervensi kebijakan/program, dan penyusunan rekomendasi kebijakan pemecahan program.</p>
3	Administrasi pembangunan	<p>1. <b>Pembangunan administrasi negara</b> mencakup : penyempurnaan administrasi negara (yang meliputi bidang organisasi, kelembagaan , kepegawaian, ketatalaksanaan, dan sarana administrasi) untuk menjalankan fungsi atau program pembangunan</p> <p>2. <b>Administrasi atau manajemen pembangunan</b> mencakup pelaksanaan fungsi manajemen penyelenggaraan program/proyek pembangunan yang meliputi perumusan, pengendalian pelaksanaan, dan pengawasan ataupun penilaian hasil suatu suatu strategi atau rencana kebijakan/program pembangunan.</p> <p>3. <b>Intervensi administrasi publik (melalui kebijakan atau manajemen publik) dalam memecahkan problem-problem dan dampak pembangunan</b> yang mencakup :</p> <p>a) <b>problem kependudukan</b> seperti urbanisasi, transmigrasi, migrasi lokal, keluarga berencana, kesehatan, trafficking, penggangguran, dsb;</p> <p>b) <b>pembangunan pariwisata</b> yang mencakup : ketahanan budaya, dampak kebijakan kepariwisataan, penataan tempat wisata, strategi pengembangan pariwisata, eco-tourism, dsb;</p>

		<p>c) <b>Lingkungan hidup</b> yang mencakup : penataan lingkungan/tata ruang, kesadaran masyarakat akan isu lingkungan (misalnya pemanasan global, perubahan iklim, ketahanan pangan), manajemen bencana alam, studi amdal, dampak eksploitasi lingkungan/alam, peranan/kemitraan/kolaborasi organisasi pemerintah, non-pemerintah non-profit (LSM, ormas, dsb) maupun swasta (perusahaan/industri) dalam menangani isu lingkungan, dsb ;</p> <p>d) <b>isu ekonomi politik pembangunan dan globalisasi</b> mencakup : dampak globalisasi liberalisasi ekonomi terhadap administrasi publik; privatisasi , penguasaan aset nasional oleh kapitalis internasional ; konflik sumber daya alam maupun manusia (tenaga kerja asing); peran perusahaan multinasional dalam pembangunan negara berkembang, dsb;</p> <p>e) <b>pembangunan manusia</b> melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan pengembangan seni dan budaya, etos kerja, dsb</p>
		-

Disamping topik-topik yang dikembangkan berdasarkan konsentrasi studi , dapat pula diidentifikasi topik-topik penelitian berdasarkan isu-isu aktual yang berkembang akhir-akhir ini.

No	Isu	Topik Penelitian
1	Problem Otonomi Daerah/Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan Pusat dan Daerah/Desa : pembagian kekuasaan, anggaran, penyusunan perda, dsb</li> <li>- Hubungan antar daerah/desa : konflik sumber daya alam, koordinasi problem regional, kerja sama daerah, dsb</li> <li>- Hubungan pejabat birokrasi/eksekutif dengan legislatif : persoalan penyusunan anggaran, Pilkada, Pilkades, penyusunan perda, dsb</li> <li>- Problem Pilkada/Pilkades : manajemen Pilkada, politisasi birokrasi, netralitas PNS, dsb.</li> <li>- Hubungan birokrasi dengan civil society : kerjasama atau networking dengan LSM, ormas, organisasi profesi, perusahaan, dsb dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan daerah dan desa, dsb.</li> </ul>
2.	Demokrasi, civil society dan Hak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peran birokrasi dalam pemberdayaan civil society, pendidikan politik dan kewarganegaraan; hubungan</li> </ul>

	Asasi Manusia	<p>administrasi negara dengan politik, penanaman nilai-nilai demokrasi, nasionalisme, hak asasi manusia, dll</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Problem gender mencakup sejauh mana sensitivitas pemerintah pada kesenjangan atau ketidakadilan gender dalam : 1) kebijakan publik (formulasi, implementasi, evaluasi) ; 2) manajemen publik ( manajemen kepegawaian, penyusunan anggaran , penilaian kinerja, promosi, dsb) ; 3) gender dan pembangunan ( partisipasi perempuan dalam pembangunan, program pembangunan yang tidak adil gender, kesehatan reproduksi, perdagangan dan eksploitasi perempuan, tenaga kerja wanita , dsb); 4) Politisasi perempuan (pemanfaatan perempuan untuk kepentingan politik, kebijakan yang mengontrol tubuh perempuan, perempuan sebagai korban konflik politik, dsb).</li> <li>- Diskriminasi pelayanan publik atas dasar perbedaan status sosial ekonomi (kaya-miskin) , ras atau suku (terhadap Tionghoa/non-pribumi, peminggiran masyarakat adat), kondisi fisik dan usia (cacat tubuh dan lansia), gender (laki dan perempuan) , seksualitas (waria, gay, lesbi), budaya (identitas budaya kelompok masyarakat tertentu), ideologi dan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).</li> <li>- Pluralisme dan multikulturalisme mencakup bagaimana negara menangani problem atau konflik karena perbedaan budaya ; bagaimana melaksanakan fungsi <i>nation building</i>; bagaimana mensosialisasikan dan menanamkan nilai multikultural, bagaimana merancang dan mengimplementasikan kebijakan kewargaan multikultural, dsb .</li> </ul>
3	Etika dan maladministrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Korupsi birokrasi : identifikasi faktor struktural kelembagaan birokrasi (struktur organisasi, aturan kebijakan, etika dan budaya birokrasi); faktor budaya dan nilai-nilai sosial/masyarakat; sosialisasi dan penanaman kesadaran anti korupsi, dll</li> <li>- Etika dan kaidah dalam manajemen dan kebijakan publik</li> <li>- Integritas dalam administrasi publik</li> <li>- Problem maladministrasi dalam manajemen dan kebijakan publik</li> <li>- Dsb</li> </ul>



Referensi :

- Caiden, Gerald. 1982. *Public Administration*, Palisades Publishers. California.
- Cheema, G.Shabbir. 2004. *From Public Administration to Governance : The Paradigm Shift in The Link Between Government and Ciitizens*. Departement of Economic and Social Affairs. United Natons, New York.
- Darwin, Muhadjir. *Aspek Metodologi Dalam Pengembangan Studi Administrasi Publik*. Artikel disampaikan pada seminar di Bidang Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Diponegoro. 17 September 1997.
- Dernhart, Robert B. 2008. *Theories of Public Organization*. Thomson Wadworth. USA
- Dernhart, Janet V. dan Robert B.Dernhart. 2003. *The New Public Service : Serving, not Steering*. M.E Sharpe.New York.
- Division for Public Economics and Public Administration-Department of Economic and Social Affairs. *Rethinking Public Administration : An Overview*. United Nations. New York
- Dwiyanto, Agus. 2004. *Reorientasi Ilmu Administrasi Publik : Dari Government ke Governance*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FISIP UGM. Yogyakarta. 21 Agustus 2004
- Frederickson, George. 1997. *The Spirit of Public Administration*, Jossey-Bass Publishers. San Fransisco.
- Frederickson, H.George ; Smith, Kevin B.; Larimer, Christopher W, and Licari, Michael J. 2012. *The Public Administration Theory Primer*. Second Edition. Westview Press. Boulder. Colorado
- Hughes, Owen E. 1994. *Public Management and Administration :An Introduction*. ST.Martin's Press.New York.
- Keban, Yeremias T.2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep , Teori dan Isu*. Penerbit Gaya Media .Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Osborne, David dan Ted Gaebler. 1992. *Mewirauahakan Birokrasi:Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik*. PT.Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
- Shafritz, Jay M. dan Russell, EW. 1997. *Introducing Public Administration*, Longman, New York.
- Sudarmo. 2002. Lokakarya Kurikulum Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Artikel disampaikan di Ruang Jurusan Ilmu Administrasi 10 Oktober

